

Rencana Kerja

DISPERINDAG PROVINSI MALUKU UTARA
(PENYEMPURNAAN / PERUBAHAN)

RENJA 2025



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

2025

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara dapat terselesaikan. Rencana kerja ini disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sitematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Renja Perubahan SKPD dengan mengacu kepada Renstra SKPD Tahun 2025-2029, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara tahun 2025 ini disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Akhirnya kepada semua pihak disampaikan terima kasih atas kerja sama, dukungan serta partisipasinya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara dapat tersusun.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Taufik dan Hidayah Nya kepada kita semua dalam upaya bersama membangun sektor industri dan perdagangan ke arah yang lebih baik. Amien...

Sofifi, November 2025
Kepala Dinas,

Yudhitya Wahab, SH, M.Si
NIP. 19810106 200501 1 006

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14
BAB IV PENUTUP	28

Daftar Tabel

Tabel 1 Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program Kegiatan (s/s Triwulan II) Tahun 2025.....	6
Tabel 2 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029 serta sebagai pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2026. Dokumen ini merupakan instrumen perencanaan tahunan yang berfungsi untuk menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor industri dan perdagangan agar tetap sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024–2029, yaitu ***“Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan”***, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku Utara memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian misi ke-2 yakni ***“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing”***

Dalam konteks tersebut, Disperindag Provinsi Maluku Utara memiliki tanggung jawab untuk mengakselerasi transformasi ekonomi melalui sektor industri pengolahan dan perdagangan yang efisien, adil, serta berkelanjutan. Keterlibatan Disperindag dalam mendukung misi pembangunan daerah telah dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra 2025–2029, yang antara lain mencakup :

- Pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dan peningkatan daya saing IKM;

- Peningkatan sarana dan prasarana distribusi serta stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- Penguatan perdagangan antarwilayah dan ekspor komoditas non-tambang;
- Perlindungan dan pemberdayaan konsumen; serta
- Digitalisasi sistem informasi industri dan perdagangan.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 dilakukan karena terdapat dinamika dan penyesuaian kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah, antara lain :

1. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025 yang mengalami perubahan prioritas dan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024;
2. Adanya perubahan kebijakan nasional di bidang industri dan perdagangan, termasuk kebijakan hilirisasi mineral, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penguatan ekosistem IKM serta pelaku usaha perdagangan;
3. Penyesuaian capaian kinerja tahun berjalan, yang memerlukan revisi indikator, keluaran, dan sasaran program agar tetap realistis dan sesuai dengan kondisi fiskal daerah;
4. Perubahan dalam alokasi anggaran yang berdampak pada realokasi atau refocusing kegiatan prioritas; serta
5. Penyesuaian dalam rangka peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja, sejalan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi, serta penguatan sistem evaluasi pembangunan daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Renja Perubahan Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan, acuan pengendalian, dan alat ukur kinerja tahunan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara. Dokumen ini juga berfungsi memastikan agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tetap sinkron dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dalam kerangka Renstra 2025–2029.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;
- h. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
- k. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2001 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional;
- l. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Pengembangan Industri Nasional;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2045;
- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029;

- p. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara ini disusun dengan maksud untuk:

- a. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026.
- b. Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara dalam rangka menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 adalah untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 mengacu dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengadministrasian.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang dimilikinya serta guna pencapaian target program prioritas daerah pada sektor industri dan perdagangan, maka pada tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara melaksanakan rencana kerja tahunan yang terdiri dari 9 Program, 20 kegiatan serta 36 sub kegiatan. Adapun rincian target, capaian kinerja, pendanaan sealiasai realisasi keuangan per 30 Juni 2025 (Triwulan II) tergambar pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program Kegiatan (s/d Triwulan II) Tahun 2025

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Renja 2025		Anggaran dan Realisasi		Realisasi Kinerja s/d Triwulan II		Ket
				Target	Pagu	PAGU	Realisasi Keuangan Per 30 Juni 2025	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				40.701.938.792	24.832.500.416	8.304.475.608			
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	<i>Persentase Kepatuhan Usaha</i>	%	90	450.000.000	39.763.800	-	-	-	
		<i>Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Tepat Waktu</i>	%	100				-	-	
	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	<i>Cakupan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar</i>	%	100	200.000.000	20.947.400	-	-	-	
	Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabaran Bahan Berbahaya	Jumlah laporan pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan	6	150.000.000	20.947.400	-	-	-	
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Yang Tepat Waktu	%	90	75.000.000	18.816.400	-	100	111,11	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	800	75.000.000	18.816.400	-	177	22,13	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan implementasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (persen)	%	100	12.525.000.000	2.587.680.760	-	-		
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Cakupan Pembangunan dan Fasilitas Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	12.525.000.000	2.587.680.760	-	-		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	1	12.500.000.000	2.587.680.760	-	-		

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Renja 2025		Anggaran dan Realisasi		Realisasi Kinerja s/d Triwulan II		Ket
				Target	Pagu	PAGU	Realisasi Keuangan Per 30 Juni 2025	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	%	9	2.500.000.000	7.387.813.300	2.606.877.500			
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	<i>Persentase Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu</i>	%	9	2.300.000.000	7.387.813.300	2.606.877.500			
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	4	200.000.000	33.469.100	-	-		
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	20	2.100.000.000	7.354.344.200	2.606.877.500	10	50,00	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (%)	%	5	1.000.000.000	179.778.100	-			
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-			1.000.000.000	179.778.100	-			

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Renja 2025		Anggaran dan Realisasi		Realisasi Kinerja s/d Triwulan II		Ket
				Target	Pagu	PAGU	Realisasi Keuangan Per 30 Juni 2025	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	10	200.000.000	179.778.100	-			
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Komoditi Potensial Yang Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku	%	75	1.895.000.000	331.631.501	-			
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Komoditi Potensial Yang Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku Berusaha	%	75	600.000.000	331.631.501	-			
	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Laporan	320	200.000.000	225.657.625	-			
	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	Produk	2	400.000.000	105.973.876	-			
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan implementasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (persen)	%	100	1.000.000.000	33.574.000	-			
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang memperoleh fasilitasi Promosi	Produk	10	300.000.000	33.574.000	-			
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	Umkm	10	300.000.000	33.574.000	-			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel	%	90	13.931.938.792	11.665.223.725	5.560.465.508			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	275.000.000	222.142.100	-	4	40,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	200.000.000	221.872.600	-	2	40,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	25.000.000	269.500	-	2	50,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	Dokumen	28	11.001.938.792	10.147.363.000	5.049.787.233	6	21,43	

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Renja 2025		Anggaran dan Realisasi		Realisasi Kinerja s/d Triwulan II		Ket
				Target	Pagu	PAGU	Realisasi Keuangan Per 30 Juni 2025	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	90	10.701.938.792	10.044.283.000	5.024.017.233	90	50,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	24	250.000.000	103.080.000	25.770.000	6	25,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Laporan	30	150.000.000	12.660.125	-	6	20,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	100.000.000	12.660.125	-	6	50,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian	Laporan	24	420.000.000	36.094.000	-	6	25,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	85.000.000	28.594.000	-	-	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	24	35.000.000	7.500.000	-	6	25,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	24	1.090.000.000	736.698.500	364.049.450	6	25,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	200.000.000	226.342.100	-	0	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	24	15.000.000	6.410.150	6.410.150	0	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	75.000.000	87.907.850	75.907.850	0	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	25.000.000	10.442.400	4.839.450	0	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	50.000.000	31.680.000	15.926.000	6	25,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	575.000.000	373.916.000	260.966.000	0	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Laporan	24	400.000.000	201.890.000	-	6	25,00	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	200.000.000	201.890.000	-	0	-	

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Renja 2025		Anggaran dan Realisasi		Realisasi Kinerja s/d Triwulan II		Ket
				Target	Pagu	PAGU	Realisasi Keuangan Per 30 Juni 2025	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	225.000.000	59.400.000	25.060.000	12	50,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	150.000.000	25.200.000	11.800.000	6	25,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	75.000.000	34.200.000	13.260.000	6	50,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	370.000.000	248.976.000	121.568.825	6	25,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	250.000.000	221.876.000	121.568.825	6	50,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	45.000.000	27.100.000	-		-	
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (persen)	%	100	6.600.000.000	4.967.334.476	137.132.600			
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangu	Cakupan implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri	%	100	6.600.000.000	4.967.334.476	137.132.600			
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	200.000.000	756.040.000	-	-		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	2	100.000.000	99.504.100	-	-		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	2	5.000.000.000	3.750.041.176	-	-		

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Renja 2025		Anggaran dan Realisasi		Realisasi Kinerja s/d Triwulan II		Ket
				Target	Pagu	PAGU	Realisasi Keuangan Per 30 Juni 2025	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	600.000.000	361.749.200	137.132.600	-	25,00	Dalam tahap pelaksanaan
3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah IUKI Dan IPKI Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	50	400.000.000	67.326.000	-	-		
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha In	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah IUKI Dan IPKI Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	100	400.000.000	67.326.000	-	-		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	2	400.000.000	67.326.000	-	-		

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Renja 2025		Anggaran dan Realisasi		Realisasi Kinerja s/d Triwulan II		Ket
				Target	Pagu	PAGU	Realisasi Keuangan Per 30 Juni 2025	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI	<i>Persentase Data Perusahaan Industri Besar Dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kabupaten/Kota Yang Masuk Dalam SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kab/Kota</i>	%	60	400.000.000	57.385.000	-			
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Perusahaan Industri Besar Dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kabupaten/Kota Yang Masuk Dalam SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kab/Kota	%	75	400.000.000	57.385.000	-			
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	24	150.000.000	57.385.000	-	-		

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara, 2025

Terlihat dari tabel di atas bahwa hingga per triwulan II tahun 2025, hampir seluruh program kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara belum berjalan. Hal ini dikarenakan sampai pada saat itu Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih fokus pada pelaksanaan efisiensi sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta pelaksanaan *refocussing* guna mendukung program kegiatan prioritas daerah dan visi misi kepala daerah terpilih.

Hingga per 30 Juni 2025, program kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara yang dapat dijalankan hanya meliputi program kegiatan yang bersifat layanan administrasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (rutin dan gaji) serta Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (yaitu kegiatan Pasar Murah Jelang Ramadhan/Idul Fitri).

Di samping itu dalam rangka menjaga performa kinerja layanan pada sektor industri dan perdagangan, hal-hal yang sifatnya koordinatif serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha tetap terselenggara dan berlangsung dengan baik (misalnya layanan perizinan industri, layanan SKA, layanan pengujian mutu serta layanan-layanan lainnya pada sektor industri dan perdagangan kewenangan provinsi).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang ada khususnya dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara, maka perlu dilakukan pergeseran *output* sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, maupun penyesuaian terhadap pagu program kegiatan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalami penurunan yang semula sebesar Rp.40.701.938.792,- maka pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 turun menjadi Rp.26.384.583.220,- atau terdapat penurunan sebesar Rp.14.317.355.572. Hampir seluruh program kegiatan yang ada mengalami penurunan, terkecuali pada program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang mengalami peningkatan dikarenakan program dimaksud merupakan salah program prioritas daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami kenaikan ataupun penurunan pagu indikatif secara rinci tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

NO	RKPD 2025				PERUBAHAN 2025				SELISIH (BER- TAMBAH / BERKURANG)	KET
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			40.701.938.792	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			26.384.583.220	-14.317.355.572	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			40.701.938.792	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			26.384.583.220	-14.317.355.572	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			19.370.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			9.867.659.676	-9.502.340.324	
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Kepatuhan Usaha Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Tepat Waktu (%)	90 %	450.000.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Kepatuhan Usaha Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Tepat Waktu (%)	90 %	39.763.800	-410.236.200	
		Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Yang Tepat Waktu (%)	100 %			Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Yang Tepat Waktu (%)	100 %			
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Yang Tepat Waktu	90 %	100.000.000	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP- MB) bagi Distributor	Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Yang Tepat Waktu	90 %	-	-100.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terinte	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terint	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	-	-50.000.000	
	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	-	-50.000.000	

NO	RKPD 2025				PERUBAHAN 2025				SELISIH (BER-TAMBAH / BERKURANG)	KET
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Yang Tepat Waktu	90 %	75.000.000	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Yang Tepat Waktu	90 %	-	-75.000.000	
	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	75.000.000	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	-	-75.000.000	
	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	-	100 %	200.000.000	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	-	100 %	20.947.400	-179.052.600	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	2 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	2 Dokumen	-	-50.000.000	
	Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah laporan pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	6 laporan	150.000.000	Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah laporan pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	6 laporan	20.947.400	-129.052.600	
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Yang Tepat Waktu	90 %	75.000.000	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Yang Tepat Waktu	90 %	18.816.400	-56.183.600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	800-1000 Dokumen	75.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	800-1000 Dokumen	18.816.400	-56.183.600	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan implementasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (persen)	100 %	12.525.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan implementasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (persen)	100 %	2.191.629.800	-10.333.370.200	
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Cakupan Pembangunan dan Fasilitasi Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	12.525.000.000	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Cakupan Pembangunan dan Fasilitasi Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	2.191.629.800	-10.333.370.200	

NO	RKPD 2025				PERUBAHAN 2025				SELISIH (BER-TAMBAH / BERKURANG)	KET
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Unit	12.500.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Unit	Rp2.191.629.800	-10.308.370.200	
	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	25.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	-	-25.000.000	
	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	0 Orang	-	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	0 Orang	-	0	
	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	0 Kegiatan	-	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	0 Kegiatan	-	0	
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	<9 %	2.500.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	<9 %	6.397.168.900	3.897.168.900	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Indeks Perkembangan Harga	100 %	100.000.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Indeks Perkembangan Harga	100 %	63.714.800	-36.285.200	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 Laporan	63.714.800	13.714.800	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 laporan	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 laporan	-	-50.000.000	

NO	RKPD 2025				PERUBAHAN 2025				SELISIH (BERTAMBAH / BERKURANG)	KET
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	<9 %	2.300.000.000	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	<9 %	6.333.454.100	4.033.454.100	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4 Laporan	200.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4 Laporan	33.469.100	-166.530.900	
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 Laporan	2.100.000.000	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 Laporan	6.299.985.000	4.199.985.000	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Cakupan pemantauan/pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (%)	100 %	100.000.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Cakupan pemantauan/pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (%)	100 %	-	-100.000.000	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 Laporan	50.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 Laporan	-	-50.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	2 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	2 Laporan	-	-50.000.000	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (%)	5 %	1.000.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (%)	5 %	-	-1.000.000.000	

NO	RKPD 2025				PERUBAHAN 2025				SELISIH (BER- TAMBAH / BERKURANG)	KET
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	-	1.000.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	-	-	-1.000.000.000	
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	400.000.000	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	-	-400.000.000	
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	10 Pelaku Usaha	100.000.000	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	10 Pelaku Usaha	-	-100.000.000	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku	300.000.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku	-	-300.000.000	
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	10 Produk	200.000.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	10 Produk	-	-200.000.000	
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Komoditi Potensial Yang Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku	75 %	1.895.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Komoditi Potensial Yang Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku	75 %	1.162.173.176	-732.826.824	
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100 %	795.000.000	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100 %	-	-795.000.000	
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	695.000.000	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	-	-695.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	2-10 Pengaduan	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	2-10 Pengaduan	-	-100.000.000	
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Komoditi Potensial Yang Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku Berusaha	75 %	600.000.000	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Komoditi Potensial Yang Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku Berusaha	75 %	900.984.826	300.984.826	
	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	0	-	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	0	-	0	

NO	RKPD 2025				PERUBAHAN 2025				SELISIH (BER-TAMBAH / BERKURANG)	KET
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	320 laporan	200.000.000	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	320 laporan	500.073.025	300.073.025	
	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	2 Produk	400.000.000	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	2 Produk	400.911.801	911.801	
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan	90 %	500.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan	90 %	261.188.350	-238.811.650	
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	8 Laporan	400.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	8 Laporan	261.188.350	-138.811.650	
	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	2-10 Kasus	100.000.000	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	2-10 Kasus	-	-100.000.000	
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan implementasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (persen)	100 %	1.000.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan implementasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (persen)	100 %	76.924.000	-923.076.000	
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang memperoleh fasilitasi Promosi	10 Produk	300.000.000	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang memperoleh fasilitasi Promosi	10 Produk	76.924.000	-223.076.000	
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	10 UMKM	300.000.000	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	10 UMKM	76.924.000	-223.076.000	
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Lokal yang memperoleh fasilitasi pemasaran	5 Produk	300.000.000	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Lokal yang memperoleh fasilitasi pemasaran	5 Produk	-	-300.000.000	

NO	RKPD 2025				PERUBAHAN 2025				SELISIH (BER-TAMBAH / BERKURANG)	KET
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	300.000.000	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	-	-300.000.000	
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk yang Memperoleh Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	20 Produk	400.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk yang Memperoleh Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	20 Produk	-	-400.000.000	
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 Laporan	100.000.000	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 Laporan	-	-100.000.000	
	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	4 Laporan	300.000.000	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	4 Laporan	-	-300.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			21.331.938.792	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			16.516.923.544	-4.815.015.248	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel	90 %	13.931.938.792	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel	90 %	10.814.608.544	-3.117.330.248	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	275.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dae	Jumlah Dokumen Perencanaan dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	222.142.100	-52.857.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	221.872.600	21.872.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	-	-50.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	25.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp269.500	-24.730.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	28 Dokumen	11.001.938.792	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	28 Dokumen	9.133.979.519	-1.867.959.273	

NO	RKPD 2025				PERUBAHAN 2025				SELISIH (BER- TAMBAH / BERKURANG)	KET
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	10.701.938.792	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	Rp9.000.899.519	-1.701.039.273	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen	250.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen	133.080.000	-116.920.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	-	-35.000.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	15.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	-	-15.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	30 Laporan	150.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	30 Laporan	12.660.125	-137.339.875	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	-25.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	25.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	-	-25.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	100.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.660.125	-87.339.875	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian	24 Laporan	420.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian	24 Laporan	198.862.300	-221.137.700	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	85.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	28.594.000	-56.406.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen	35.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen	7.500.000	-27.500.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	125.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	-	-125.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	-	-50.000.000	

NO	RKPD 2025				PERUBAHAN 2025				SELISIH (BER- TAMBAH / BERKURANG)	KET
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	125.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan - Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	162.768.300	37.768.300	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	24 Laporan	1.090.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	24 Laporan	724.698.500	-365.301.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	226.342.100	26.342.100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	6.410.150	-8.589.850	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	75.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor -	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	75.907.850	907.850	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan -	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.442.400	-14.557.600	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu -	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	31.680.000	-18.320.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	575.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	373.916.000	-201.084.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD -	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	-	-50.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24 Dokumen	100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD -	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24 Dokumen	-	-100.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	24 Laporan	400.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	24 Laporan	201.890.000	-198.110.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	100.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	-	-100.000.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	200.000.000	Pengadaan Mebel -	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	201.890.000	1.890.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	-	-100.000.000	

NO	RKPD 2025				PERUBAHAN 2025				SELISIH (BER- TAMBAH / BERKURANG)	KET
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	225.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	71.400.000	-153.600.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	37.200.000	-112.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	34.200.000	-40.800.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	370.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	248.976.000	-121.024.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	221.876.000	-28.124.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	45.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	27.100.000	-17.900.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-75.000.000	
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (persen)	100 %	6.600.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (persen)	100 %	5.577.604.000	-1.022.396.000	
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangu	Cakupan implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri	100 %	6.600.000.000	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan In	Cakupan implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri	100 %	5.577.604.000	-1.022.396.000	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi -	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	756.040.000	556.040.000	

NO	RKPD 2025				PERUBAHAN 2025				SELISIH (BER-TAMBAH / BERKURANG)	KET
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen	108.250.500	8.250.500	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	-	-200.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	5.000.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	4.270.064.300	-729.935.700	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	600.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	443.249.200	-156.750.800	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	100.000.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	-	-100.000.000	
	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	2 Laporan	200.000.000	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	2 Laporan	-	-200.000.000	
	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	2 Rekomendasi	100.000.000	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	2 Rekomendasi	-	-100.000.000	
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	2 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	2 Dokumen	-	-100.000.000	

NO	RKPD 2025				PERUBAHAN 2025				SELISIH (BER- TAMBAH / BERKURANG)	KET
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah IUKI Dan IPKI Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	50 %	400.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah IUKI Dan IPKI Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	50 %	67.326.000	-332.674.000	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha In	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah IUKI Dan IPKI Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	100 %	400.000.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah IUKI Dan IPKI Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	100 %	67.326.000	-332.674.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	400.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	67.326.000	-332.674.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUST	Persentase Data Perusahaan Industri Besar Dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kabupaten/Kota Yang Masuk Dalam SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kab/Kota	>60 %	400.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NA	Persentase Data Perusahaan Industri Besar Dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kabupaten/Kota Yang Masuk Dalam SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kab/Kota	>60 %	57.385.000	-342.615.000	

NO	RKPD 2025				PERUBAHAN 2025				SELISIH (BER- TAMBAH / BERKURANG)	KET
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Perusahaan Industri Besar Dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kabupaten/Kota Yang Masuk Dalam SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kab/Kota	>75 %	400.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Perusahaan Industri Besar Dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kabupaten/Kota Yang Masuk Dalam SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kab/Kota	>75 %	57.385.000	-342.615.000	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	24 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Na -	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	24 Dokumen	57.385.000	-92.615.000	
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	2 Dokumen	50.000.000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas -	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	2 Dokumen	-	-50.000.000	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	200.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas -	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	-	-200.000.000	

Sumber : RKPD Perubahan Maluku Utara Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara 2025-2029.

Semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman, dan program kegiatan berjalan lancar sehingga target, sasaran strategis/indikator kinerja dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan demi maju dan berkembangnya industri dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara.

Sofifi, November 2025
Kepala Dinas,

Yudhitya Wahab, SH, M.Si
NIP. 19810106 200501 1 006

